

## **Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota di Jawa Timur**

**Mirza Avicenna Asyifyan**

Magister Akuntansi, Universitas Jember, Jalan Kalimantan Tegalboto No.27 Jember, 68121,  
Indonesia

Email: mirzasena38@gmail.com

### **Abstrak**

Otonomi daerah melahirkan kemandirian, dimana suatu pemerintahan daerah wajib meningkatkan potensi penerimaan daerah untuk meminimalkan ketergantungan keuangannya kepada pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini menganalisis pendapatan asli daerah pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur. Menggunakan data panel yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2013-2022. Populasi penelitian ini yaitu pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur sebanyak 9 pemerintah kota yaitu: Blitar, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Surabaya dan Batu. Pendekatan penelitian yaitu kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sistematis analisis data penelitian menggunakan 3 tahapan yaitu: uji normalitas, uji t (satu sampel) dan uji hipotesis menggunakan SPSS. Dengan analisis data One-Sample Test penelitian ini juga diarahkan untuk menguji hipotesis yaitu: pendapatan asli daerah pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 26 (tinggi). Hasil penelitian menemukan bahwa hipotesis penelitian tidak teruji sehingga dalam kurun waktu atau periode pengamatan pendapatan asli daerah pemerintah kota di Jawa Timur pada posisi tinggi.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah; Otonomi Daerah; Kinerja Keuangan Daerah

### ***Regional Original Income of City Governments in East Java***

#### ***Abstract***

*Regional autonomy gives birth to independence, where a regional government is obliged to increase the potential for regional revenues to minimize its financial dependence on the central government. The aim of this research is to analyze the local revenue of city governments in East Java Province. Using panel data sourced from the Directorate General of Financial Balance, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia for 2013-2022. The population of this research is 9 city governments in East Java Province, namely: Blitar, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Surabaya and Batu. The research approach is quantitative with descriptive research type. The systematic analysis of research data uses 3 stages, namely: normality test, t test (one sample) and hypothesis testing using SPSS. By analyzing the One-Sample Test data, this research is also directed at testing the hypothesis, namely: the original regional income of the city government in East Java Province is 26 (high). The results of the research found that the research hypothesis was not tested so that in the period or period of observation, the original regional income of the city government in East Java was in a high position.*

**Keywords:** *Locally-generated revenue; Regional autonomy; Regional Financial Performance*

## Pendahuluan

Otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa. Selain mengatur prinsip desentralisasi, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten, dan kota, untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang didasarkan pada kepentingan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Anggaran kepala daerah—gubernur (provinsi), bupati (kabupaten) dan wali kota— harus memberikan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setiap tahun atau pada akhir tahun terkait kebijakan keuangan. Dalam menjamin kinerja keuangan pemerintah daerah, diperlukan implementasi prinsip akuntabilitas dalam menjalankan anggaran, diantaranya adalah transparan, akuntabel, dan adanya partisipasi aktif dari masyarakat (Adzima et al., 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan kualitas Otonomi Daerah (OTODA), sebagaimana fungsi PAD yang menjadi capaian utama pada setiap pemerintah daerah. OTODA memberikan peluang bagi setiap daerah untuk menggali dan mengelola potensi kekayaan daerah. Implementasi OTODA yang bijak memungkinkan setiap daerah dalam memperoleh penerimaan daerah yang besar (Republik Indonesia, 2014). PAD berkontribusi dalam meminimalisir kebergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Sumber PAD diantaranya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Gambar 1 di bawah ini memberikan pemetaan empiris bahwa PAD menjadi kajian penting mengingat keberadaannya yang lahir dari adanya otonomi daerah.



**Gambar 1. Knowledge Map of Pendapatan Asli Daerah**

Pemikiran singkat di atas menunjukkan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan: "Bagaimana PAD pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur?" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis PAD pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini diharapkan memberikan inspirasi bagi pemerintah kota untuk membuat rencana untuk meningkatkan PAD. Meningkatkan PAD secara bersamaan dapat mengurangi penggunaan dana transfer dari sumber eksternal, sehingga dapat menjadi pijakan menuju kemandirian dan membantu pemerintah pusat meningkatkan kemandirian daerah lain di

Indonesia. PAD dapat digunakan sebagai cerminan kualitas OTODA, sebagaimana fungsi PAD yang menjadi capaian utama pada setiap pemerintah daerah.

Teori Desentralisasi Bodman - Hodge menjelaskan dampak antara otonomi daerah terhadap kemandirian keuangan. Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Teori ini menekankan pentingnya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Bodman & Hodge, 2010). Derajat desentralisasi menggambarkan kontribusi penerimaan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Daerah dengan tingkat penerimaan daerah yang tinggi cenderung memiliki ketergantungan rendah terhadap dana transfer, sehingga penerimaan daerah dapat menjadi indikator kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan dapat terwujud apabila pemda mampu memaksimalkan potensi daerah yang ada, serta mengelola keuangannya tanpa bergantung dengan bantuan pusat dalam pelaksanaan pemerintahannya.

OTODA bertujuan sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebagai akselerasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, OTODA dapat meningkatkan keberhasilan dan kemampuan suatu daerah dalam mengelola produk domestik regional bruto (Vidalia et al., 2024). Penyelenggaraan pemerintah daerah yang berbasis dengan otonomi daerah ditujukan untuk mendekati masyarakat kepada pemerintah agar pelayanan publik menjadi optimal (Indriani et al., 2020). Pemerintah daerah (Pemda) bertanggungjawab dalam pengelolaan potensi daerah berdasarkan asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Pemda memperoleh kewenangan dalam mengurus keuangannya sendiri dengan ketentuan yang telah di atur oleh pemerintah pusat (Republik Indonesia, 2014).

PAD merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Republik Indonesia, 2014). Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah. PAD berkontribusi dalam meminimalisir kebergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat (Fatmawatie, 2016). Sumber PAD diantaranya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Halim & Kusufi, 2014). PAD yang tinggi menandakan bahwa pemda berhasil melaksanakan desentralisasi fiskal (Fatmawatie, 2016).

**Tabel 1. Penelitian terdahulu**

Peneliti & Tahun	Judul	Lokus	Tahun Pengamatan
(Erawati & Kelep, 2023)	Hubungan Dana Alokasi Umum, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Kinerja Keuangan Daerah	Kabupaten Lembata	2012-2021
(Ginting et al., 2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	30 Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara	2017-2021
(Aulia & Sari, 2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Dengan Belanja Pegawai Sebagai Variabel Intervening	7 Kabupaten/Kota pada Provinsi Bangka Belitung	2017-2021
(Aslindar & Hapsari, 2022)	Determinan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota	35 Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah	2015-2019

(Ardelia et al., 2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah	Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan	2016-2020
(Ramahdani & Trisnarningsih, 2022)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	Kota Surabaya	2011-2019
(Rohyana & Abdul Rozak, 2022)	Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	Kabupaten Bandung	2017-2019
(Permatasari & Trisnarningsih, 2022)	Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah	38 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur	2014-2018
(Fernandes & Putri, 2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	19 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat	2017-2020
(Azhar, 2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	Kota Langsa	2011-2020
(Nauw & Riharjo, 2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah	13 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Papua Barat	2015-2018
(Sari & Halmawati, 2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah	19 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat	2015-2018
(Utary, 2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal	Kota Sukabumi	2016-2018
(Sari et al., 2020)	Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	33 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara	2014-2017
(Priyono et al., 2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat	31 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah	2015-2018
(Harjito et al., 2020)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia	439 Kabupaten dan Kota di Indonesia	2014-2016
(Jayanti, 2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal	35 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah	2016-2018
(Prastiwi & Aji, 2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	5 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	2013-2018
(Abdullah, 2020)	Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah serta dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Daerah	26 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat	2012-2016
(Sari & Mustanda, 2019)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah	Kabupaten Badung	2013-2017
(Waskito et al., 2019)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal	23 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Aceh	2015-2017
(Vanesha et al., 2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal	11 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jambi	2011-2017

(Machmud & Radjak, 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Daerah	Kabupaten Gorontalo	2012-2016
(Ayem & Pratama, 2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal	5 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	2011-2016
(Antari & Sedana, 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	9 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Bali	2011-2015
(Aji & Mukhibad, 2020)	Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening	34 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah	2014-2016

Berdasar tabel di atas dapat dikemukakan bahwa semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Tingginya rata-rata presentase PAD mencerminkan kualitas otonomi daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. PAD yang tinggi berpotensi dalam meningkatkan kualitas otonomi daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Semakin tinggi jumlah penerimaan PAD maka mencerminkan keberhasilan masing-masing daerah dalam pengolahan serta tata kelola potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki.

### Metode Penelitian

Rancangan penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih mengingat data penelitian dalam bentuk numerik. Sedangkan jenis penelitian yang dipilih yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif mengacu pada statistika deskriptif, berupa proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Cooper & Schindler, 2017). Penelitian ini juga disebut dengan penelitian univariate karena merupakan penelitian terhadap satu variabel yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik dokumentasi yang diambil dari publikasi data oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Populasi penelitian ini yaitu Provinsi Jawa Timur. Sampel penelitian ini terdiri dari 9 pemerintah kota diantaranya: Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya dan Kota Batu. Rentang waktu pengamatan yang digunakan pada penelitian ini berupa data tahunan antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 sehingga tipe data penelitian yaitu data panel atau disebut dengan pooled data. Data panel merupakan data yang menggabungkan data time series dan data cross section. Jenis data yaitu data sekunder dengan subjek penelitian atau lokus penelitian yaitu pemerintah kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sistematika analisis data penelitian menggunakan 3 tahapan yaitu: uji normalitas, uji t (satu sampel) dan uji hipotesis menggunakan SPSS.

## Hasil dan Pembahasan

Sebagai variabel penelitian, data PAD disajikan setiap satu tahun untuk memahami beberapa hal penting diantaranya: jumlah pengamatan (N), nilai rata-rata (Mean) merupakan rata-rata angka yang diperoleh individu, standar deviasi (SD) adalah jarak rata-rata skor dari Mean. Semakin tinggi SD maka semakin besar penyebaran skor-skornya dan semakin tinggi perbedaan satu dengan lainnya, sehingga datanya heterogen. Namun jika nilai SD semakin kecil maka datanya homogen, sedangkan jika nilai SD sama dengan 0 maka tidak ada variasi dalam data.

**Tabel 2. One Sample Statistic**

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
LN_PAD	90	26.3094	1.11194	0.11721

Sumber: Data Sekunder, Diolah dengan SPSS (2024)

Berdasar tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah pengamatan penelitian ini sebanyak 90 data yang relevan dengan jumlah data panel penelitian yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 (atau 10 tahun data time series), dan jumlah kota di Jawa Timur sebanyak 9 sehingga jumlah total pengamatan sebanyak 90 data. Rata-rata data yang diamati sebesar 26 yang berarti rata-rata PAD pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur yaitu tinggi.

### Uji Normalitas

Uji normalitas lazim digunakan pada analisis data statistika parametrik, seperti halnya dalam penelitian ini mengingat One-Sample T Test merupakan alat uji dalam statistika parametrik. Namun demikian uji normalitas tidak dilakukan dalam penelitian ini karena jumlah data yang diobservasi melebihi 30 mengingat distribusi sampling error term telah mendekati normal maka tidak perlu dilakukan uji normalitas. Jumlah observasi penelitian ini sebanyak 90 artinya melebihi 30 maka uji normalitas dapat diabaikan (Ajija et al., 2011).

### Uji t (satu sampel) dan Pengujian Hipotesis

Tabel 3 merupakan hasil olah data menggunakan One-Sample Test karena penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yaitu “bagaimana PAD pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur?”. Jawabannya dapat diukur oleh nilai Sig. (2-tailed) yaitu sebesar 0,010. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan yaitu sebesar 0,05 = 5% maka dapat dijelaskan bahwa nilai PAD kota di Jawa Timur yaitu tinggi dengan nilai rasio rata-rata dalam sepuluh tahun terakhir sebesar sebesar 26 (tabel 2) jika nilai PAD-nya ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural.

**Tabel 3. One Sample Test**

Test Value = 26						
t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference		
				Lower	Upper	
LN_DAU	2.639	89	0.010	0.30936	0,0765	0,5423

Sumber: Data Sekunder, Diolah dengan SPSS (2024)

Pengujian hipotesis penelitian ini didasarkan pada rumusan hipotesis yang dibangun dari kajian teori dan kajian empirik yang relevan yaitu: PAD pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 26. Dasar pengambilan keputusan untuk menguji hipotesis penelitian yaitu:

H<sub>0</sub>: DAU pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur sama dengan 26

H<sub>a</sub>: DAU pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur tidak sama dengan 26

Hipotesis statistik penelitian ini:

H<sub>0</sub> :  $\mu = 26$

H<sub>a</sub> :  $\mu \neq 26$

Untuk pengujian hipotesis dan jika menggunakan nilai signifikan maka menggunakan ketentuan sebagai berikut:

Jika nilai sig < alpha maka H<sub>0</sub> ditolak

Jika nilai sig  $\geq$  alpha maka H<sub>0</sub> diterima

Berdasar perhitungan menggunakan SPSS sebagaimana tabel 3 bahwa nilai signifikansi sebesar 0,010. Nilai ini lebih kecil dari alpha 0,05 maka H<sub>a</sub> yang diterima, yang berarti PAD pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur tidak sama dengan 26. Nilai 26 ini menunjukkan nilai rata-rata dari PAD pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur setelah dilakukan transformasi data menggunakan data tahun 2013 hingga tahun 2022. Dengan demikian rumusan hipotesis yang berbunyi: PAD pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 26 adalah tidak teruji.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 26, dengan demikian hipotesis tidak teruji. Secara keuangan daerah, nilai 26 menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pada posisi tinggi sehingga penelitian ini relevan dengan penelitian (Asyifyan, 2024) bahwa pada tahun 2013 hingga 2022 kemandirian keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada posisi tinggi. Tingginya rata-rata presentase PAD mencerminkan kualitas otonomi daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. PAD yang tinggi berpotensi dalam meningkatkan kualitas otonomi daerah pada pemerintah kota se-Jawa Timur. Semakin tinggi jumlah penerimaan PAD maka mencerminkan keberhasilan masing-masing daerah dalam pengolahan serta tata kelola potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga kemandirian keuangan daerah dapat tercapai (Novitasari & Novitasari, 2019).

Sebagai tolak ukur kesiapan daerah dalam menjalankan OTODA, KKD merupakan cerminan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola keuangannya dengan benar. setiap peningkatan PAD dapat menyebabkan peningkatan terhadap KKD pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur (Asyifyan, 2024). Teori Desentralisasi Bodman - Hodge menjelaskan dampak antara otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Bodman – Hodge, desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Derajat desentralisasi menggambarkan kontribusi penerimaan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Daerah dengan tingkat penerimaan daerah yang tinggi cenderung memiliki ketergantungan rendah terhadap dana transfer, sehingga penerimaan daerah dapat menjadi indikator kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat terwujud apabila pemerintah daerah mampu memaksimalkan potensi daerah yang ada, serta mengelola keuangannya tanpa bergantung dengan bantuan pusat dalam pelaksanaan pemerintahannya.

## **Simpulan**

Indikator makro ekonomi yaitu PAD menjadi variabel penting untuk mendorong kemandirian suatu daerah. Kemandirian yang dimaksud yaitu kemandirian pada sektor keuangan, mengingat kepala daerah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat dengan sumber dana internal yang kuat. PAD pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur pada kisaran tahun 2013-2022 memiliki rata-rata sebesar Rp 683.971.873.395,54. Nilai ini sekaligus memposisikan bahwa

secara rata-rata berada pada kategori kemampuan keuangan yang tinggi. Disarankan kepada masing-masing pemerintah kota untuk mempertahankan dan meningkatkan perolehan PAD. Disarankan juga kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas kajian, yaitu mengkaitkan PAD dengan kinerja ekonomi misalnya pertumbuhan ekonomi daerah (provinsi/kabupaten/kota).

### Daftar Pustaka

- Abdullah, S. (2020). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Widya Ganecwara*, 10(4). <https://doi.org/10.36728/jwg.v10i4.1216>
- Adzima, F., Nuraini, F., & Desipradani, G. (2022). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 90. <https://doi.org/10.25273/inventory.v6i2.14239>
- Aji, M. W., & Mukhibad, H. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 3(1), 97–115. [www.jaga.unand.ac.id](http://www.jaga.unand.ac.id)
- Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanti, M. R. (2011). *Cara cerdas menguasai Eviews*. Salemba Empat.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60–81. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>
- Aslindar, D. A., & Hapsari, H. P. N. (2022). Determinan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 37–50. <https://doi.org/10.37932/ja.v11i1.398>
- Asyifyan, M. A. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2022*. Universitas Jember.
- Aulia, R., & Sari, I. (2023). Pengaruh Pad Dan Dau Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Dengan Belanja Pegawai Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2021). *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 152–167. <http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>
- Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169–182. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i2.2987>
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(02), 164–174. <https://doi.org/10.56196/jta.v11i02.190>
- Bodman, P., & Hodge, A. (2010). What drives fiscal decentralisation? Further assessing the role of income. *Fiscal Studies*, 31(3), 373–404. <https://doi.org/doi:https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2010.00119.x>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.

- Erawati, T., & Kelep, E. K. (2023). Hubungan Dana Alokasi Umum, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lembata. *Jurnal E-Bis*, 7(1), 305–317. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1119>
- Fatmawatie, H. N. (2016). *Otonomi Daerah dan Pendapatan Daerah*. STAIN Kediri Press.
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 198–209. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.102>
- Ginting, J. A., Yulsiati, H., & Dwitayanti, Y. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2021. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(2), 315–320. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10043776>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Salemba Empat.
- Harjito, Y., Nugraha, P. S., & Yulianto, Y. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14061>
- Indriani, I. K., Lestari, M. P., & Triani, M. (2020). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Kalimantan. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 175. <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7675>
- Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3), 335–341. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.30045>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 6/PMK.07/2012 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah. In *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia* (Vol. 69, Issue 555).
- Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1106>
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 10 No.
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174. <https://doi.org/10.25273/inventory.v3i2.5244>
- Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). *Jurnal Kajian Bisnis*, 28(1), 89–105.

- Priyono, N., Fatimah, A., & Nurcahya, Y. (2020). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 5(2), 212–225. <https://doi.org/10.31002/rep.v5i2.2202>
- Ramahdani, A. F., & Trisnarningsih, S. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(1), 301–310. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.3924>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah* (pp. 1–23).
- Rohyana, C., & Abdul Rozak, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. *Land Journal*, 3(2), 60–71. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v3i2.2308>
- Sari, & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 56–60. <https://doi.org/10.4324/9781003322603-5>
- Sari, & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Sari, N., Nainggolan, B. R. M., Purba, R. A., Saragih, T. B., & Banjarnahor, W. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(1), 219–223. <https://doi.org/10.31539/costing.v4i1.1547>
- Utary, V. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *JAMMI –Jurnal Akuntansi UMMI*, II(1), 80–96.
- Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 27–36. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i1.6609>
- Vidalia, D., Hariyani, D. S., & Sulistiyowati, N. (2024). *Kata kunci : Ekspor , Impor , Harga Minyak Dunia , Nilai Tukar Rupiah , Pertumbuhan Ekonomi Economic Growth : Export , Import , Crude Oil Price , Exchange Rate Indonesia ' s Economic Growth ( q-to-q )*. 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.25273/inventory.v8i1.18380>
- Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Rusherlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238. <https://doi.org/10.18196/rab.030247>